



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADE VICTOR MANAMPANG MANGAPUTUA SIAHAAN
2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. CILANDAK
3. NHK : 235101

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.669.876.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 357 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 779.354.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 448.448.000
3. Tanah Seluas 951 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 2.069.376.000
4. Tanah Seluas 654 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 1.538.208.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/185 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 1.959.105.000
6. Tanah Seluas 315 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 875.385.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 708.500.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA SEDAN Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 535.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 84.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.401.358.296



F. HARTA LAINNYA

Rp. 246.000.000

Sub Total

Rp. 11.110.234.296

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.110.234.296

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.